

- MONOGRAF -



URGENSI PENERAPAN GREEN ECONOMY

DALAM KONSEP GANDENG GENDONG
DI KAMPUNG WISATA REJOWINANGUN YOGYAKARTA

Qurrata A'yunina Ciptantri Hadipranata

Hasanah Setyowati

STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
(c) 2022

**Urgensi Penerapan Green Economy dalam Konsep
Gandeng Gendong di Kampung Wisata
Rejowinangun Yogyakarta**

Qurrata A'yunina C.H., SIP, M.Si
Hasanah Setyowati, S.E., M.B.A



STIE Widya Wiwaha

Urgensi Penerapan Green Economy dalam Konsep
Gandeng Gendong di Kampung Wisata Rejowinangun
Yogyakarta

Penulis:

Qurrata A'yunina C.H.

Hasanah Setyowati

v, 59 hlm., 27 x 30 cm

ISBN: 978-623-99100-3-7

Layouter : Agung Slamet Prasetyo

Diterbitkan STIE Widya Wiwaha

Alamat:

STIE Widya Wiwaha

Jl Lowanu Sorosutan UH VI/20

Yogyakarta

Telp. 0274 377091

Email: library@stieww.ac.id

Cetakan pertama, Januari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan ijin-Nya, maka penyusunan monograf ini dapat diselesaikan. Monograf ini disusun untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan penelitian “Urgensi Penerapan Green Economy dalam Konsep Gandeng Gendong di Kampung Wisata Rejowinangun Yogyakarta”. Dalam tulisan ini, hasil penelitian yang disampaikan terkait dengan penerapan *green economy* di Kampung Wisata Rejowinangun Yogyakarta. *Green economy* menjadi salah satu solusi penting untuk diterapkan di semua aspek termasuk pariwisata, khususnya kampung wisata di Kota Yogyakarta. *Green economy* merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan aspek ekonomi melalui kegiatan pembangunan yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berupaya keras membantu penyusunan monograf ini dapat terwujud. Semoga karya ini bisa dijadikan pedoman dan informasi berharga untuk peneliti, praktisi dan pihak-pihak terkait. Tak ada gading yang tak retak, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan isi monografi ini.

Yogyakarta, Desember 2022

Penulis,

Qurrata A’yunina Ciptantri Hadipranata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
II. GREEN ECONOMY.....	6
2.1. Pengertian Green Economy	6
2.2. Penerapan Green Economy	8
2.3. Konsep Gandeng Gendong	9
2.4 Kampung Wisata	10
2.4.1. Kampung Wisata Rejowinangun	12
2.4.2. Klaster Agro.....	14
2.4.3. Klaster Budaya.....	15
2.4.4. Klaster Herbal.....	16
2.4.5. Klaster Kerajinan.....	17
2.4.6. Klaster Kuliner	18
III. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	19
3.1. DESKRIPSI INFORMAN PENELITIAN	19
3.2. HASIL WAWANCARA	22
3.3. PEMBAHASAN	32
IV. PELUANG DAN KENDALA.....	47
4.1. Peluang.....	47

4.2. Kendala.....	48
V. SIMPULAN.....	54
VI. DAFTAR PUSTAKA.....	56

I. PENDAHULUAN

Pariwisata alternatif saat ini menjadi patron bagi para wisatawan. Pariwisata alternatif saat ini menjadi konsep wisata yang menarik karena lebih bersahabat dengan alam. Interaksi dengan masyarakat lokal juga menjadi keunggulan yang tak bisa didapat ketika berkunjung ke destinasi wisata biasa. Beberapa bentuk pariwisata alternatif antara lain: pariwisata spiritual, ekowisata, pariwisata agro, dan kampung wisata. Kampung wisata merupakan bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan dan menjadi salah satu program Pemerintah Republik Indonesia yang diharapkan dapat mempercepat kebangkitan pariwisata dan memicu pertumbuhan ekonomi.

Yogyakarta merupakan kota tujuan wisata nomor dua setelah Bali, dan pelaku pariwisata berperan aktif dalam pengembangan pariwisata alternatif tersebut. Saat ini Kota Yogyakarta memiliki 17 kampung wisata, di mana tiap kampung wisata memiliki karakteristik berbeda-beda. Ada kampung wisata yang menonjol karena alamnya, seni budaya, kuliner, kerajinan, dan lain sebagainya. Tidak semua kampung wisata menerima wisatawan yang jumlahnya signifikan, terlebih di fase bangkit dari pandemi Covid-19. Kekuatan kampung wisata dapat dibuktikan dengan fakta-fakta berikut ini: (1) Desa wisata, 89,6% masyarakatnya masih melakukan pekerjaan utama di luar industri pariwisata, seperti petani, pekerja swasta, kerajinan tangan, dll. (2) Diantara masyarakat yang tersisa, sebanyak 11,3% benar-benar terdampak selama pandemi Covid-19 dikarenakan tidak ada pekerjaan lain

selain pariwisata. Kekuatan kampung wisata menunjukkan bahwa masyarakat di desa wisata sebelum pandemi Covid-19 sebenarnya sudah mandiri.

Melihat data tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan kampung wisata disaat pandemi Covid-19 kemarin ini sangat diperlukan dikarenakan banyak sekali tempat destinasi-destinasi wisata yang tutup dikarenakan terus menurunnya jumlah pengunjung. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyatakan bahwa kegiatan pariwisata akan tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga masyarakat mampu mendapatkan pemasukan disaat pandemi Covid-19 yang kemarin terjadi. Sehingga seluruh kampung wisata di berbagai daerah di Indonesia dapat dengan segera pulih.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengaplikasikan konsep 'gandeng gendong' untuk kampung-kampung wisata yang ada di Kota Yogyakarta. Gandeng gendong ini adalah konsep saling kolaborasi dan saling mengisi antara kampung wisata satu dengan lainnya (Hendratmoko, 2021). Dalam perkembangannya konsep gandeng gendong tersebut tidak hanya terbatas dengan sesama kampung wisata, tapi bisa juga dengan berbagai mitra yang disebut 5K, yaitu: (1) kampung, (2) kota, (3) komunitas, (4) kampus, dan (5) korporat.

Antara kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap lingkungan sering terjadi ketidakseimbangan. Kegiatan pariwisata yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi cenderung

mengarah kepada eksploitasi terhadap sumber daya alam sehingga lingkungan yang menjadi dampaknya. Krisis lingkungan sedikit demi sedikit mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat, tidak hanya di tingkat domestik tapi juga secara global. Penggunaan produk-produk kemasan yang sekali pakai langsung terbuang adalah salah satu dari penyebab krisis lingkungan. Limbah kemasan produk tersebut diketahui tidak ramah lingkungan dan membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai oleh bumi. Persoalan pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga yang mencemari sungai dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Banyak hutan gundul karena tingginya permintaan bahan baku industri yang berbahan kayu, tanpa ada usaha untuk penghijauan kembali. Belum lagi permasalahan sampah yang selalu menjadi polemik yang belum tersolusikan secara menyeluruh dan optimal.

Kota Yogyakarta merupakan daerah penghasil sampah dengan jumlah yang besar. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Yogyakarta, Bapak Haryoko, sampah yang dihasilkan di Kota Yogyakarta mencapai 300 ton per hari. Dari 300 ton sampah tersebut, yang dibuang ke Tempat Penguangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan mencapai 270 ton. Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya bahwa mulai bulan Maret 2022 TPST Piyungan tidak lagi menerima kiriman sampah. Alasannya area pembuangan sampah di sana sudah sangat penuh, sehingga tidak sanggup lagi menampung kiriman sampah. Instruksi itu bersumber dari Surat Edaran (SE) bernomor 188/41512 tanggal 20 Desember 2021, dengan diketahui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kuncoro Cahyo Aji (Tribun, 9 Februari 2022).

Green economy menjadi salah satu solusi penting untuk diterapkan di semua aspek termasuk pariwisata, khususnya kampung wisata di Kota Yogyakarta. *Green economy* merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan aspek ekonomi melalui kegiatan pembangunan yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan.

Kampung Wisata Rejowinangun yang memiliki lima klaster di dalamnya juga merupakan pelaku pariwisata di Kota Yogyakarta. Disampaikan oleh Bapak Dadik selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Rejowinangun bahwa ketika ada wisatawan yang berkunjung ke Kampung Wisata Rejowinangun, sejak penyambutan lalu kegiatan wisata di klaster yang dituju, penyiapan makan untuk wisatawan sampai selesai; warga Rejowinangun sudah dilibatkan sehingga tidak perlu mencari sumber daya dari luar. Kegiatan-kegiatan di Kampung Wisata Rejowinangun tidak dapat dilepaskan dampaknya terhadap lingkungan alam sekitarnya. Salah satu *guide* lokal di Kampung Wisata Rejowinangun, menyampaikan bahwa Kampung Wisata Rejowinangun sudah bekerja sama dengan kampung wisata lain, misal di daerah Purbayan, Kotagede. Misal wisatawan setelah menginginkan wisata agro di Kampung Wisata Rejowinangun lalu lanjut wisata ke kota perak. Ini merupakan gambaran singkat mengenai penerapan konsep gandeng gendong yang sudah dilakukan di Kampung Wisata Rejowinangun. Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan apabila ada sampah atau limbah yang timbul akibat kegiatan wisatawan di Kampung Wisata

Rejowinangun sudah ada warga yang mengelola dan memilah sampah, meski belum dilakukan secara menyeluruh oleh semua warga Rejowinangun.

Penelitian ini mencakup studi sampai masuk kelima klaster yang ada di Kampung Wisata Rejowinangun, yaitu: klaster kerajinan, klaster agro, klaster herbal, klaster budaya, dan klaster kuliner. Peneliti mengumpulkan informasi awal dari Ketua Pokdarwis lalu melanjutkan ke setiap klaster tersebut untuk memperoleh data yang lebih detil supaya memiliki gambaran yang komprehensif terhadap penerapan *green economy* dalam konsep gandeng gendong di Kampung Wisata Rejowinangun.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). mengetahui bagaimana penerapan *green-economy* di Kampung Wisata Rejowinangun, (2). Mengetahui penerapan konsep gandeng-gendong, program dari Pemerintah Kota Yogyakarta di Kampung Wisata Rejowinangun Yogyakarta, (3). Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan *green-economy* di Kampung Wisata Rejowinangun di Yogyakarta.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik untuk kalangan akademik, pelaku pariwisata, dan juga pemerintah. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan pendampingan terhadap kampung wisata yang ada di Kota Yogyakarta untuk menerapkan *green economy* dalam konsep gandeng gendong. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kampung-kampung wisata tersebut.

II. GREEN ECONOMY

2.1. Pengertian Green Economy

United Nations Environment Programme (UNEP) menjadi salah satu pioner pengembangan konsep ekonomi hijau, menegaskan bahwa di samping mengedepankan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, diperlukan pula upaya untuk mengurangi risiko terhadap lingkungan dan kelangkaan ekologis (UNEP, 2014). United Nation Environment Programme (UNEP) memberikan sebuah pengertian tentang ekonomi hijau sebagai kegiatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, di sisi lain kegiatan ini mampu menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. UNEP menganggap bahwa ekonomi hijau ini merupakan suatu kegiatan perekonomian yang rendah karbon, tidak mengandalkan pada bahan bakar fosil, hemat sumber daya alam dan yang terakhir adalah berkeadilan sosial.

Lebih lanjut Loiseau et al., (2016) yang menjelaskan bahwa green economy merupakan sebuah konsep "payung" yang mencakup berbagai implikasi terkait pertumbuhan, kesejahteraan, efisiensi, serta kegiatan untuk mengurangi risiko penggunaan sumber daya alam (SDA) yang bertujuan untuk mendukung transisi yang berkelanjutan. Kesadaran dan tanggung jawab atas kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat diterapkan

di berbagai bidang salah satunya pada pariwisata, atau yang seringkali dikenal dengan nama ekowisata.

Green economy bukan sebuah kondisi, melainkan proses transformasi dan kemajuan dinamis yang berkelanjutan. Menurut Danish (2012), ekonomi hijau menghasilkan kesejahteraan manusia serta akses terhadap kesempatan yang adil bagi semua orang. Dalam proses tersebut, integritas lingkungan dan ekonomi juga perlu dijaga agar sesuai dengan kemampuan daya dukung bumi yang terbatas.

Dengan demikian, *green economy* ini akan menjadi suatu alat atau sarana yang diharapkan mampu memberikan setidaknya tiga keluaran, yaitu:

- a. Adanya sumber-sumber penghasil serta lapangan pekerjaan yang baru.
- b. Emisi karbon yang rendah, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi peningkatan polusi dan limbah.
- c. Memberikan kontribusi untuk tujuan sosial yang lebih luas melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan sosial, dan pengurangan kemiskinan.

Secara singkat ekonomi hijau dapat didefinisikan dalam beberapa point: peningkatan kualitas hidup dan kesetaraan sosial, meminimalisir resiko lingkungan dan kelangkaan ekologi, menjaga keberlangsungan sumber daya hayati bumi, reformasi kebijakan nasional, dan perkembangan pasar kebijakan international dan infrastruktur (Andrew, Jarvis A.V., 2011).

Ayu *et al.* (2014) menyatakan bahwa tujuan konsep *green economy* adalah untuk meningkatkan aspek ekonomi melalui kegiatan pembangunan yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan. Ditambahkan, penerapan *green economy* berarti menerapkan konsep ekonomi yang memiliki orientasi pada peningkatan aspek ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan.

Ibnou-Laaroussi *et al.* dalam studi yang dilakukan oleh Firmansyah (2022) *green economy* ternyata memiliki beberapa turunan, seperti: *green job*, *green tourism*, *green financing* dan *investment*. Penerapan *green economy* ternyata relevan juga untuk dilakukan di kampung wisata. Salah satu upaya memecahkan keterbelakangan pembangunan di pedesaan adalah dengan *green tourism* berbasis pedesaan atau dikenal desa wisata.

2.2. Penerapan Green Economy

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Sedangkan Riant Nugroho (2014) penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, penerapan *green economy* adalah menerapkan konsep ekonomi baru yang berorientasi pada peningkatan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan (Sari, 2014).

2.3. Konsep Gandeng Gendong

Program gandeng gendong merupakan suatu program dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Kata 'gandeng' bermakna bahwa semua elemen masyarakat saling bergandengan tangan dengan niat saling membantu agar semua pihak dapat maju bersama. Sedangkan kata 'gendong' memiliki makna masyarakat membantu warga lain yang tidak mampu berjalan. Kekuatan akan muncul jika semua unsur masyarakat dalam kebersamaan. Gandeng gendong pada tahapan awal merupakan strategi pemberdayaan masyarakat, strategi pengentasan kemiskinan untuk melibatkan semua elemen masyarakat. Menurut Heroe Poerwadi melalui Kumparan.com, tahapan pertama gandeng gendong adalah sebagai strategi untuk

pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Tahap kedua melihat partisipasi masyarakat dalam melihat potensi strategis yang bisa diandalkan. Intinya, mengembangkan potensi di banyak penjuru. Sedangkan tahap ketiga adalah menjadikan gandeng gendong sebagai perencanaan strategis untuk pembangunan yang mengintegrasikan seluruh pelaku 5K, yaitu: kampung, kota, komunitas, kampus, dan korporat (Iza dan Nurhaeni, 2021).

Sedangkan Putra *et al.* (2020) menyatakan bahwa pelaksanaan konsep gandeng gendong harus melibatkan kolaborasi berbagai *stakeholders* yaitu: pemerintah kota, swasta, kampus, komunitas, dan kampung. Pihak-pihak tersebut harus berkomitmen yang memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Sangat penting bagi tiap pihak tersebut untuk memiliki sikap saling percaya untuk membangun kesepahaman tentang konsep gandeng gendong yang akan dilaksanakan. Dan untuk mencapai tujuan bersama tersebut perlu adanya berbagi pemahaman (*share understanding*) antara lain dengan proses *hearing* antar-pihak yang berkepentingan supaya pelaksanaan gandeng gendong akan efektif dan efisien.

2.4 Kampung Wisata

Kampung wisata merupakan bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan dan menjadi salah satu program Pemerintah Republik Indonesia yang diharapkan dapat mempercepat

kebangkitan pariwisata dan memicu pertumbuhan ekonomi. Namun tidak setiap kampung dapat dijadikan kampung wisata, menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), sekurangnya diperlukan tiga komponen untuk membangunnnya. Pertama, potensi wisata yang tersedia, antara lain lahan, lokasi, daerah serta bagaimana ekosistem yang dapat membantu pengembangan destinasi wisata nantinya. Kedua, minat dan kesiapan masyarakat terhadap pengembangan destinasi wisata setempat. Kampung wisata akan sangat berkembang jika dikelola oleh kampung itu sendiri. Kebutuhan akan organisasi yang khusus mengurus kampung wisata dibutuhkan agar berkelanjutan serta melibatkan pihak yang menentukan arah kampung wisata. Dan terakhir, konsep kampung wisata harus unik yang akan menjadi nilai jual di antara destinasi wisata di daerah lainnya.

Titisari *et al.* (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa potensi alam dapat dikembangkan bersama-sama dengan potensi sosial-budaya dan dikemas dalam bentuk kampung wisata. Pengembangan kampung wisata berdasarkan *eco-culture* dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola potensi alamiah dan sosial lokal serta keunikan tradisi budaya.

Kampung wisata perlu dikelola secara baik dan berkelanjutan. Kampung wisata harus memiliki tim

pengelola yang selalu memantau dan berkoordinasi untuk menjalankan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tahap legalisasi untuk memperkuat status hukum kampung wisata merupakan hal yang utama, apalagi hal ini dapat memberikan manfaat bagi kampung wisata berupa pendampingan dari pemerintah ataupun dinas terkait (Astiana *et al.*, 2022)

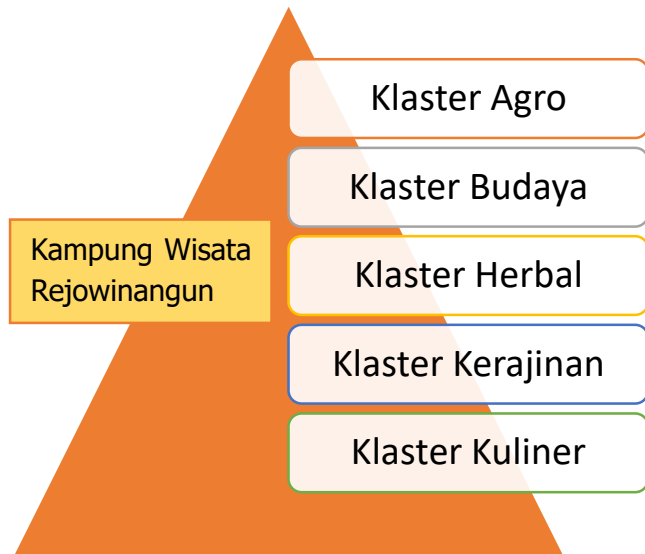
Pengelolaan kampung wisata dengan konsep green economy sangat penting, karena dapat menjaga kelestarian alam dan ekosistem sekitar (Makower Joel, 2009). Surna dan Sutanto (2013) menjelaskan bahwa setidaknya ada 10 aspek yang harus dipenuhi, yaitu: (1) mengutamakan nilai guna, intrinsik dan kualitas; (2) mengikuti aliran alam; (3) sampah adalah makanan; (4) rapih dan keragaman fungsi; (5) skala tepat guna/skala keterkaitan; (6) keanekaragaman; (7) kemampuan diri, organisasi diri dan rancangan diri; (8) partisipasi dan demokrasi langsung; (9) kreativitas dan pengembangan masyarakat; (10) Peran strategis dalam lingkungan buatan lanskap dan perancangan spasial. Dengan begitu, kampung wisata tidak hanya berprioritas pada mencari keuntungan semata, juga harus menjaga kondisi alam sekitar agar terciptanya sinergi positif antara manusia dan alam sekitar.

2.4.1. Kampung Wisata Rejowinangun

Kampung Wisata Rejowinangun merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Yogyakarta. Kampung Wisata Rejowinangun ditetapkan masuk dalam 50

desa wisata terbaik yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. Terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, kampung ini menawarkan wisata edukasi agro, kerajinan, kuliner, sejarah, seni budaya, hingga souvenir.

Kampung Wisata Rejowinangun memiliki banyak potensi yang beraneka ragam, yang kemudian dipetakan menjadi beberapa klaster unggulan, yaitu Klaster Kampung Budaya (RW 1 – 5), Klaster Kampung Kerajinan (RW 6 – 7), Klaster Kampung Herbal (RW 8 – 9), Klaster Kampung Kuliner (RW 10), dan klaster Kampung Agro (RW 11 – 13). Tujuan pengklasteran ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengenali potensi masing-masing wilayah selain itu juga mempermudah lembaga sosial, Pemerintah Kelurahan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan membuat program sehingga bisa tepat sasaran. Dengan adanya klaster ini maka pengembangan potensi semakin cepat dan terarah. Sistem pengklasteran atau pembagian wilayah berdasar potensinya ini berkembang menjadi sebuah kampung wisata klaster Rejowinangun yang sudah banyak dikunjungi baik untuk tujuan wisata maupun studi banding program kegiatan khususnya pemberdayaan masyarakat.



2.4.2. Klaster Agro

Klaster Agro berada di RW 11, 12 dan 13 dengan spesifikasi masing-masing RW berbeda misalnya RW 11 sebagai kampung Anggrek, RW 12 Sebagai Kampung Agro edukasi khusus tanaman sayuran dan buah, RW 13 sebagai Kampung Flory khusus untuk tanaman hias. Saat ini Kampung Agro ini menjadi ikon Kelurahan Rejowinangun dengan nama Kampung Wisata Agro Edukasi yang sudah mendatangkan banyak wisatawan baik dari DIY maupun luar DIY. Selain itu kampung Agro ini juga pernah masuk dalam Museum rekor Indonesia dengan pembuatan keripik daun varietas terbanyak (272 jenis daun) yang diberi

nama RON RENYAH yang saat ini sudah mendapat pesanan dari berbagai daerah dan supermarket.

Gambar pemanfaatan lahan terbatas di Klaster Agro

2.4.3. Klaster Budaya

Klaster Budaya berada di RW 01, 02, 03, 04 dan 05 dengan potensi seni yang beraneka ragam yang sudah memiliki nilai jual baik dengan mendatangkan wisatawan maupun bekerjasama dengan pengusaha lokal



seperti Kebun Raya Kebun Binatang Gembiraloka dan hotel di wilayah Kelurahan Rejowinangun. Adapun potensi seni yang ada antara lain: wayang durasi 2 jam berbahasa inggris, karawitan, sanggar tari, keroncong, jathilan anak, mocopat, hadroh, angklung, gejog lesung, dan lain sebagainya.



Gambar Edan-edanan di Klaster Budaya

2.4.4. Klaster Herbal

Klaster Herbal berada di RW 08 dan 09 Kelurahan Rejowinangun dimana dua RW ini sebagai sentra pembuat jamu Gendong yang kami beri nama J'GER (Jamu Gendong Rejowinangun) dan jamu instan. Dari situ berkembang kampung herbal sebagai sarana pemenuhan kebutuhan utama pembuat jamu gendong dengan cara menanam tanaman herbal disetiap rumah, jalan dan gang dengan pemanfaatan lingkungan yang ada.



Gambar salah satu produk dari Klaster Herbal

2.4.5. Klaster Kerajinan

Kampung Kerajinan berada di RW 06 dan 07 Kelurahan Rejowinangun di mana kedua RW ini banyak sekali *home industry* khususnya di bidang kerajinan baik yang sifatnya lokal maupun yang sudah dijual di luar wilayah DIY di antaranya: kerajinan kulit, fiber, ukir kayu, batik tulis dan jumputan, *shuttlecock*, lukis kaca terbalik, wayang kulit, pemanfaatan limbah plastik, dan lain sebagainya.



Gambar Pengrajin Blangkon di Klaster Kerajinan

2.4.6. Klaster Kuliner

Klaster Kuliner berada di RW 10 di mana di RW ini banyak sekali rumah tangga yang membuat makanan kecil. Sebagai sentra kuliner dalam pemasarannya dibantu dengan himbauan kepada seluruh masyarakat khususnya RT, RW, PKK dan lembaga sosial lainnya untuk menggunakan produk lokal (gandeng-gendong) dalam setiap kegiatan sejak tahun 2012 dengan brand REMAJA (Rejowinangun Makmur Jaya) yang dikelola oleh P2WKSS PKK Kelurahan Rejowinangun dan menghimpun seluruh UKM kuliner di wilayah Kelurahan Rejowinangun.

III. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

3.1. PELAKSANAAN PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Wisata Rejowinangun, yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Yogyakarta. Kampung Wisata Rejowinangun ditetapkan masuk dalam 50 desa wisata terbaik yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. Terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, kampung ini menawarkan wisata edukasi agro, kerajinan, kuliner, sejarah, seni budaya, hingga souvenir.

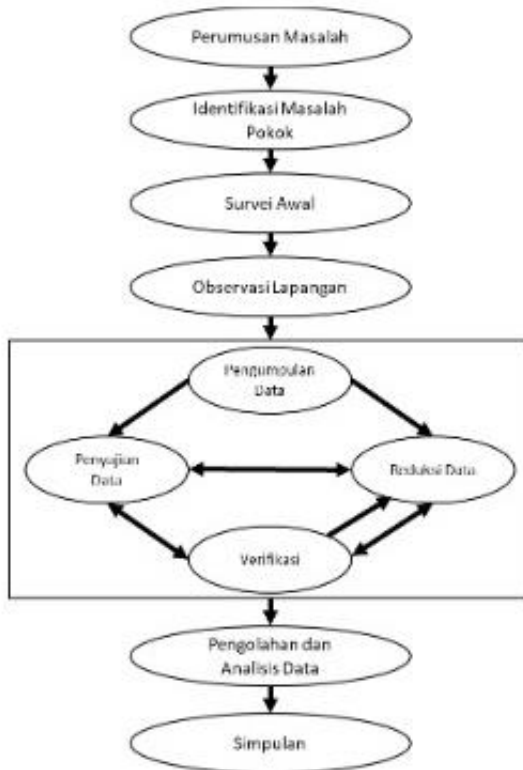
Kampung Wisata Rejowinangun memiliki banyak potensi yang beraneka ragam, yang kemudian dipetakan menjadi beberapa klaster unggulan, yaitu Klaster Kampung Budaya yang berada di RW 1 sampai dengan 5, Klaster Kampung Kerajinan yang berada di RW 6 dan 7, Klaster Kampung Herbal berada di RW 8 dan 9, Klaster Kampung Kuliner berada di RW 10, dan klaster Kampung Agro di RW 11 sampai dengan 13. Pengklasteran ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi potensi masing-masing kawasan. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pada lembaga-lembaga sosial, pemerintah daerah, ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan membuat program bisa lebih tepat sasaran. Adanya pengklasteran ini membantu elaborasi potensi lebih fokus, terarah, dan cepat. Sistem pengklasteran

berbasis potensi ini berkembang menjadi sebuah kampung wisata Rejowinangun yang menarik perhatian wisatawan baik dalam maupun luar Yogyakarta baik untuk tujuan wisata maupun studi banding.

Penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yang dapat dilihat pada Gambar 1 Bagan Alir Penelitian. Penjabaran proses penelitian yang dilakukan di Kampung Wisata Rejowinangun untuk mengetahui penerapan *green economy* dalam konsep gandung gendong meliputi:

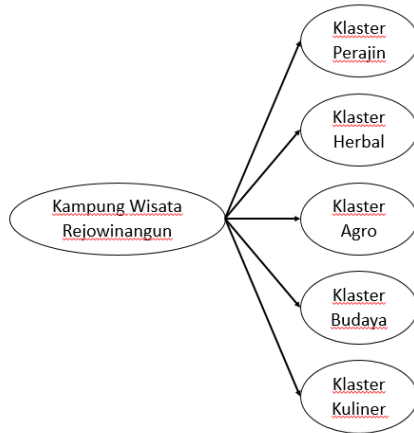
- a. Merumuskan masalah berdasarkan berbagai tinjauan literatur dengan studi pustaka yang diperlukan sebagai bahan referensi dan tambahan pengetahuan.
- b. Mengidentifikasi permasalahan pokok yang perlu diteliti.
- c. Survei awal dengan melakukan wawancara pendahuluan agar dapat menentukan siapa calon responden dan informan serta waktu untuk melaksanakan penelitian.
- d. Observasi lapangan dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan pada subjek penelitian.
- e. Pengumpulan data penelitian di Kampung Wisata Rejowinangun menggunakan analisis kualitatif model Miles dan Huberman.
- f. Pengolahan data dan analisis data.

- g. Menarik simpulan, saran serta memberikan solusi berdasarkan hasil penelitian.



Gambar 1 Bagan Alir Penelitian

Pada Gambar 2 berikut adalah Bagan Alir Pengumpulan Data di Kampung Wisata Rejowinangun:



Gambar 2 Bagan Alir Pengumpulan Data

3.2. DESKRIPSI INFORMAN PENELITIAN

Informan menjadi sumber informasi yang penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Ketua Pokdarwis Rejowinangun, penggiat kerajinan blangkon dan pengrajin kulit mewakili klaster kerajinan, penggiat dari klaster agro, penggiat minuman herbal, penggiat tari mewakili klaster budaya, pembuat roti mewakili klaster kuliner, guide lokal, dan anggota DPRD Kota Yogyakarta.

3.3. HASIL WAWANCARA

3.2.1. Potensi

Kampung Wisata Rejowinangun memiliki berbagai potensi yang terdapat di seluruh

penjuru kampung, dan baiknya potensi-potensi tersebut sejak awal sudah dikelompokkan bahkan jauh hari sebelum kampung wisata ini terbentuk. Seperti disampaikan di awal bab ini bahwa Kampung Wisata Rejowinangun terbagi menjadi 5 klaster, yaitu: kerajinan, herbal, agro, budaya, dan kuliner.

Ketua Pokdarwis dalam wawancara menyampaikan bahwa meski tidak mempunyai potensi sumber daya alam, seperti gunung, laut, atau lembah, Kampung Wisata Rejowinangun fokus pada potensi yang dimiliki, dan menitikberatkan menjadi kampung wisata edukasi, sebagaimana dikutip dari verbatim wawancara dengan ketua pokdarwis berikut ini:

“kami itu kan tidak punya destinasi alam... kan gak ada destinasi alam seperti gunung, lembah, kan gak ada... makanya branding kampung wisata kami yaaa wisata edukasi jadi mungkin jarang ada tapi ternyata wisata edukasi yang paling ini... nyatanya dari sekian tahun kami ada itu dalam setiap bulan pasti ada kunjungan, kunjungan yang sifatnya rombongan dan pengen belajar membuat bakpia misalnya, atau belajar membuat batik, dan sebagainya... beberapa rombongan juga datang untuk belajar tentang pemberdayaan...”

Untuk potensi-potensi yang ada di Kampung Wisata Rejowinangun sebenarnya masih dapat dikembangkan lagi. Tetapi kebanyakan masih terkendala urusan biaya, legalitas, kesempatan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam ajang-ajang yang

diselenggarakan oleh pemerintah, dinas
ataupun swasta.



Gambar Wawancara dengan
Ketua Pokdarwis

3.2.2. Penerapan Green Economy

Penerapan *Green Economy* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan ekonomi yang memiliki orientasi pada peningkatan aspek ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, seperti pemanfaatan limbah, *reduce, reuse, recycle*, dan lain sebagainya. Secara umum, *green economy* sudah diterapkan di sebagian besar klaster di Kampung Wisata Rejowinangun, sebagaimana dikutip dari verbatim wawancara dengan penggiat kerajinan blangkon berikut:

“kain perca, kita memanfaatkan limbah, kain perca itu dari yang dibuat rok itu bisa jadi 1 blangkon dewasa. Yang biasa dalemnya kardus bekas, karena sekarang mahal-mahal saya ganti pakai map bekas. Sebenarnya yang enak itu pakai koran bekas, tapi sekarang koran

bekas harganya mahal. Kalo yang putih kita cari yang putih polos seperti bekas print-printan gitu beli di tukang rongsok”.

Demikian pula di klaster agro, limbah makanan dari klaster kuliner atau atau limbah organik dari klaster herbal, diambil oleh klaster agro untuk diolah menjadi pestisida alami, sebagaimana dikutip dari verbatim wawancara dengan wakil dari klaster agro dan klaster kuliner berikut:

“Food Loss nya saya yang mengambil, limbahnya sana saya olah lagi jadi desinfektan untuk bidang pertanian, jadi pestisida alami, kan Aburizal Bakrie sekarang di NTB membuat yang namanya (agrowisata) zero-waste, kita sekarang sedang merintis menangani foodloss nya”

“Gak ada limbah, limbah cuma kayak plastik kemasan tepung sama telur tapi gak ada limbah yang banyak, karena saya juga gak pakai air, roti saya 100% cairannya cuma susu sama telur jadi gak pakai air, limbahnya sedikit cuma plastik kemasan yang beli dari toko..”

Terkait dengan pengelolaan sampah, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari rumah cenderung masih rendah, kurang dari 50%, sehingga pengelola mempekerjakan orang di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) untuk memilah sampah untuk kemudian diolah untuk menjadi media tanam, sebagaimana

dikutip dari verbatim wawancara dengan wakil dari klaster agro berikut:

“dulu sebelum pandemi sempat jalan, baik yang organik maupun anorganik, tapi baru 30% sudah alhamdulillah, karena kesadaran masyarakat untuk memilah saja sulit, kami selaku pengolah harus memilah-milah, di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) kami menyuruh orang, begitu sampah masuk, kita sudah ada SOP nya. Kami menampung dari hotel campur macem-macem ada sayur ada tulang, untuk tenaga sortir kesulitan di situ. Akhirnya kami menugaskan orang, sehingga finishing ke produksi kami sudah tinggal giling lembutkan keringkan menjadi media tanam”.

3.2.3. Penerapan Konsep Gandeng-gendong

Sesuai wawancara dengan Ketua Pokdarwis Kampung Wisata Rejowinangun konsep gandeng gendong sudah dilaksanakan di kampung wisata ini dalam bentuk berbagai jenis kegiatan, semisalnya: proteksi produk lokal untuk penyediaan snack wisatawan yang berkunjung ke Kampung Wisata Rejowinangun maupun ketika ada permintaan dari Pemerintah Kota untuk menyediakan snack, klaster kuliner benar-benar sudah merasakan digandeng dan digendong, sebagaimana dikutip dari hasil verbatim wawancara dengan Ketua Pokdarwis berikut ini:

“sudah, jadi gandeng gendong ini terutama adalah untuk snack njih...misalnya kalo disini ada snack songgobuwono, ada REMAJA... Rejowinangun Makmur Jaya itu, itu kan snack2 itu di pesan oleh mereka untuk proteksi produk local... jadi itu antara lain snack.... kemudian kegiatan, kegiatan misalnya eeee pengajian misalnya gitu ya... kita ngajukan... kemudian, snack akan disediakan oleh mereka... nah kadang ada yang berwujud uang, ada yang berwujud snack... nah ini akan mengambil, dia juga akan menunjuk pengusaha snack disini misalnya kan gitu.... REMAJA mengadakan snack di Baitul A'laa atau misalnya di mana gitu... kemudian untuk rapat, rapat-rapat itu kan kemarin 1 bulan omzet sudah sampai dengan 28jt lho...1 pengusaha snack itu... ada yang sampai 7jt, macam-macam..”

Di klaster kuliner sudah ada beberapa penggiat kuliner yang menerapkan gandeng gendong, seperti: Remaja, Songgo Buwono, dan lain-lain. Bahkan disampaikan oleh Ibu Wida dari klaster kuliner bahwa gandeng gendong justru awalnya dari Rejowinangun. Penggiat dari klaster budaya yang diwakili oleh Sanggar Tari Argo Dumilah menyatakan bahwa sudah merasakan pernah digandeng dan digendong oleh pemerintah maupun dinas mulai tahun 2020 sejak memiliki Nomor Induk Kebudayaan (NIK) tetapi sebelumnya semua kegiatan ditanggung secara mandiri. Kemudian disampaikan juga bahwa pendampingan dari pemerintah dirasakan terlalu ketat sehingga usaha kreatif untuk menciptakan kesenian baru terkadang tidak bisa maksimal.

Sedangkan menurut perwakilan dari klaster kerajinan, konsep gandeng gendong walaupun sudah pernah ada pendampingan dari pemerintah, tetapi hasil yang dirasakan belum maksimal, karena adanya kendala waktu dan dokumen yang harus dilengkapi. Bahkan ada penggiat kerajinan yang sama sekali belum tersentuh program pemerintah.

Hal ini senada yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kota Yogyakarta, sebagaimana dikutip dari verbatim wawancara berikut ini:

“kalau ditinjau dari sisi anggaran, tahun 2022 kemarin, program gandeng gendong itu yang lewat aplikasi nglarisi itu nilainya untuk belanja makan minum pemerintah kota itu adalah 43 milyar, dan yang terserap oleh program itu hanya 3,7 milyar... artinya dari lingkungan pemerintah kota sendiri sebenarnya tidak konsekuen dengan program yang dijalankan... oleh sebab itu perlu banyak sekali inovasi...perlu banyak sekali perubahan yang harus dilakukan agar program ini bisa berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan... kemudian kalo memang perlu dibuat semacam UPT, karena di tahun 2023 kemungkinan anggaran yang akan dipakai untuk program nglarisi atau gandeng-gendong lewat aplikasi nglarisi itu lebih dari 50 milyar... ini sebuah produk yang sangat bagus...tapi sangat tidak bagus dalam hal implementasinya”

3.2.4. Peran Pemerintah

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah memfasilitasi dan mendampingi Kampung Wisata

Rejowinangun untuk menerapkan *green economy* dalam konsep gandung gendong dengan memberikan beberapa pelatihan dan juga bantuan mesin jahit, sebagaimana dikutip dari verbatim wawancara dengan salah satu penggiat kerajinan blangkon berikut:

“Bikin pelatihan-pelatihan gitu, bantuan pernah dulu sekali mesin jahit tapi udah beberapa tahun yang lalu”.

Klaster kerajinan mengusulkan kepada pemerintah supaya dapat membantu memfasilitasi menciptakan sistem kerja yang berkelanjutan, sebagaimana dikutip dari verbatim wawancara dengan salah satu penggiat kerajinan berikut:

“Jadi nanti ada sistem prosedurnya kalau produk datang bagaimana, pembeliannya seperti apa, notanya yang dikasih apa saja, jualannya online apa offline, notanya seperti apa. Standarnya nanti mau seperti apa, untuk standar penjualan dan standar packingnya. Jadi nanti kalo ada regenerasi-regenerasi tinggal baca dulu, sudah mengerti SOP nya”.

Klaster budaya menyarankan supaya pemerintah yang menangani gandung gendong untuk lebih peduli terhadap perkembangan sanggar-sanggar yang ada supaya usaha kreatifnya dapat berjalan lebih baik lagi, sebagaimana dikutip dari verbatim wawancara dengan salah satu penggiat sanggar berikut ini:

“Kalau sanggar seperti punya saya, selain dinas kota mungkin dari pihak pemerintah yang menangani gandeng gendong untuk kepedulian per sanggar mungkin ada sedikit dana lah supaya lebih maju. Sebenarnya saya pengen mengajukan bantuan gamelan. Kan ini saya beli sendiri, kalau ada anak-anak yang menari, anak-anak juga yang menabuh. Kemarin kita syuting Antara dari kampung wisata anak-anak untuk openingnya pakai ini, saya memang minta sama yang kru syuting, ini dikasih gamelan gimana biar beda dengan yang lain tidak langsung menari aja.”

3.2.5. Kendala Yang Dihadapi

Dalam mengelola sebuah kampung wisata, tentunya tidak luput dari masalah ataupun kendala-kendala yang harus dihadapi. Begitu pula dengan Kampung Wisata Rejowinangun, kendala utama adalah masalah biaya, dan SDM, sebagaimana dikutip dari verbatim wawancara dengan ketua pokdarwis berikut:

“masalah klasik...pertama itu yaa jer basuki mawa beya.. baru2 aja toh dapet2 hibah kayak-kayak gitu itupun tidak saya gunakan untuk membangun kampung wisata secara keseluruhan.. termasuk digunakan untuk kesejahteraan... nah kalo yang kedua itu eee sdm, sdm bukan berarti tidak pintar.. pintar atau tidak pintar...menguasai atau tidak menguasai, bukan... sempat atau tidak...di dalam pengurusan pengolahan ini.. karena masing2 mempunyai kesibukan sendiri2 ya ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang bekerja di instansi tertentu.. lha itu kan

yang gak bisa kita jagakke wektune... nah kadang-kadang.. sdm ini ya walaupun sampai saat ini tidak begitu masalah, karena selalu saja ada yang bisa... misalnya ada tamu nihh.. ada tamu hari sabtu.. ya kuli bangunan yo gak mau libur hari sabtu wong wahaye tompo raport... pas bayaran... nah begitu juga untuk pekerja2 yang lain, setu aku raiso... aku mesti tutup buku... aku mesti ngene..mesti ngene... nah, gitu.. alhamdulillah sampai sekarang masih ada saja yang bisa... saya pun juga pernah tidak bisa.. bukan berarti saya bisa terus... misal kalo saya di tugaskan di Kalimantan selama sekian anu kan gabisa... ya sudah saya via telfon aja kadang... jadi ini misal yang kasih sambutan ini, yang nganu iki, dan sebagainya... ok jalan... terus kemudian yang ketiga untuk menjaga 1 prestasi itu lebih sulit.. ”.



Gambar Hasil Wawancara

3.3. PEMBAHASAN

Green-economy merupakan langkah kebijakan ekonomi dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pembangunan industri. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme kebijakan yang kongkrit yang berbasis *green-economy*. Konsep *green-economy* merupakan solusi terbaik untuk menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Menerapkan sistem *green economy* dalam kehidupan sehari-hari bisa dikatakan mempunyai kemudahan dan kesulitannya sendiri. Kemudahannya, segala sesuatu yang dilakukan dalam *green economy* merupakan hal yang sebenarnya mudah dikerjakan. Namun hal yang sulit untuk dikerjakan adalah keseriusan dan konsistensi dalam melakukannya.

Misalnya, harus memiliki komitmen kuat untuk mengurangi karbon serta konsisten dalam aksinya. Bukan berarti sistem ini tidak mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Beberapa negara *seperti* Korea Selatan telah menerapkan sistem Ekonomi Hijau ini sejak tahun 2009. Setelah Korea Selatan, ada China yang sudah menerapkan sistem berkelanjutan ini sejak tahun 2010.

Dikutip dari laman ppsdmaparatur.esdm.go.id, *Pemerintah* Indonesia dalam rangka mewujudkan *green economy* atau ekonomi hijau telah melakukan perencanaan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK).

Inisiatif PRK ini bertujuan untuk secara eksplisit memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan contohnya target pengurangan gas rumah kaca dan daya dukung ke dalam kerangka perencanaan pembangunan.

Lalu inisiatif PRK untuk fase pertama telah diadopsi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Untuk saat ini, inisiatif PRK telah memasuki fase kedua yaitu fase implementasi.

Kemudian dalam implementasinya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah didukung oleh UN Partnership for Action on Green Economy (UN-PAGE) Indonesia melalui United Nations Institute for Research and Training (UNITAR) telah melaksanakan studi Green Economy Learning Assessment (GELA) di Indonesia. Studi ini memiliki tujuan yaitu mengembangkan program pelatihan tentang ekonomi hijau, khususnya dalam kerangka implementasi PRK yang komprehensif.

Selain itu juga bertujuan agar dapat diimplementasikan secara nasional oleh aparatur sipil negara dan perencana pembangunan di berbagai kementerian atau institusi terkait, pemerintah

daerah, serta pemangku kepentingan utama lainnya.

Alasan utama munculnya program green growth ini didasari oleh harapan akan pembangunan yang berkelanjutan yang dibangun melalui suatu pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif dengan penggabungan antara faktor sosial dan faktor lingkungan dalam proses ekonomi. Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan tersebut, maka kita tidak bisa terlepas dari faktor-faktor kunci penggeraknya yaitu ekonomi hijau serta pertumbuhan hijau. Keterlibatan faktor-faktor penggerak tersebut dapat dipahami melalui suatu proses dimana pertumbuhan hijau atau green growth yang didefinisikan sebagai pertumbuhan dalam sektor ekonomi melalui kontribusi terhadap penggunaan modal alam secara bertanggung jawab, pengurangan maupun pencegahan polusi, dan peningkatan kesejahteraan, melalui ekonomi hijau. Proses keselarasan antara pertumbuhan hijau dengan ekonomi hijau inilah yang akan melahirkan pencapaian atas pembangunan yang berkelanjutan. Maka, ketiga konsep ini : pertumbuhan hijau – ekonomi hijau – pembangunan berkelanjutan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan (Kasztelan, 2017).

Dalam pelaksanaannya, ekonomi hijau juga memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan khusus ekonomi hijau sebagai berikut:

1. Meningkatkan kewaspadaan dari urgensi untuk beralih dari bahan bakar fosil di dalam sistem energi Indonesia.
2. Mengoptimalkan penerapan efisiensi energi yang mengarah pada sistem dekarbonisasi energi Indonesia.
3. Memperkuat kebijakan mitigasi perubahan iklim dalam negeri.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat dengan tetap memperhatikan risiko kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan ekonomi tersebut.
5. Mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
6. Menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem.
7. Memberikan sanksi terhadap pelaku aktivitas-aktivitas ekonomi yang membahayakan dan berpotensi merusak lingkungan.
8. Mendorong pelaku usaha untuk memproduksi barang, melakukan aktivitas perdagangan dan konsumennya pun akan mengkonsumsi hal-hal yang ramah lingkungan atau produk barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan energi baru

terbarukan pada skala nasional maupun global. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi perubahan iklim adalah melalui penandatanganan *Paris Agreement* sebagai bentuk keterlibatan dalam komitmen global untuk menanggulangi perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan rencana ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, serta mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk ekonomi hijau yang akan dikerjakan adalah implementasi kebijakan harga karbon dalam bentuk *carbon cap and trade*, serta skema pajak karbon di 2023.

Prinsip utama dari ekonomi hijau adalah mampu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan setiap generasi di masa yang akan datang. Selain itu, ada beberapa prinsip lain dalam ekonomi hijau, prinsip tersebut yaitu :

1. Prinsip Berkelanjutan

Ekonomi hijau adalah sarana untuk mewujudkan ekonomi keberlanjutan.

2. Prinsip Kesejahteraan

Ekonomi hijau memungkinkan semua orang untuk mewujudkan dan menikmati kesejahteraan.

3. Prinsip Keadilan

Ekonomi hijau mempromosikan kesetaraan di intra dan antar generasi atau mendukung pemerataan sosial dan ekonomi.

4. Prinsip Martabat

Ekonomi hijau menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

5. Prinsip Alam Sehat

Ekonomi hijau memulihkan keanekaragaman hayati yang hilang, berinvestasi dalam sistem alam dan merehabilitasi hutan yang telah mengalami degradasi.

6. Prinsip Batas Planet

Ekonomi hijau menjaga, merestorasi dan berinvestasi pada alam.

7. Prinsip Inklusi

Ekonomi hijau bersifat inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan.

8. Prinsip Tata Kelola dan Akuntabilitas yang Baik

Ekonomi hijau harus bisa dipertanggungjawabkan.

9. Prinsip Ketahanan

Ekonomi hijau berkontribusi pada ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan.

10. Prinsip Efisiensi dan Kecukupan

Ekonomi hijau diarahkan untuk mendukung aktivitas produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

11. Prinsip Generasi

Ekonomi hijau berinvestasi untuk masa sekarang dan masa depan.

12. Prinsip Kesejahteraan

Ekonomi hijau mendorong semua orang mampu menikmati kesejahteraan dan kemakmuran.

13. Prinsip Pemerintah yang Baik

Ekonomi hijau dipandu oleh institusi – institusi yang tahan banting, terintegrasi dan bertanggung jawab.

Penerapan Green Economy di Indonesia memiliki tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah, antara lain:

1. Masih Bergantung pada Sumber Daya Batu Bara
Transisi *green economy* Indonesia yang difokuskan pemerintah masih terhambat oleh tergantungnya ekonomi Indonesia dari ekspor sumber daya batu bara.

2. Kurangnya Pemanfaatan Potensi Energi Terbarukan

Dalam acara Grand Launching Proyek Investasi Berkelanjutan, 21 Maret 2022, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 437,4 Gigawatt. Namun, Indonesia baru bisa memanfaatkan 2,5% atau sekitar 10,4 Gigawatt. Berikut adalah rincian potensi dan pemanfaatan EBT:

- Energi matahari berpotensi memiliki 207,8 Gigawatt dan baru dimanfaatkan 0,07%.

- Energi tekanan air, memiliki potensi 94,6 Gigawatt dan baru dimanfaatkan 8,16%
- Energi panas bumi memiliki potensi 23,9 Gigawatt, baru dimanfaatkan 8,9%
- Energi angin memiliki potensi 60,6 Gigawatt dan baru terpakai 0,25%
- Bioenergi memiliki potensi 67,8 Gigawatt dan baru terpakai 5,8%
- Gelombang laut memiliki potensi 17,9 Gigawatt dan belum terpakai sama sekali.

3. Literasi Masyarakat

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengatakan (BKPM) mengatakan literasi masyarakat mengenai energi hijau masih minim. Melihat hal tersebut, maka pemerintah akan kesulitan mengajak masyarakat menggunakan produk ekonomi hijau.

4. Biaya Investasi

Biaya investasi untuk membangun infrastruktur green economy Indonesia sampai tahun 2030 mencapai Rp3.799 triliun, Angka tersebut masih sulit direalisasikan melihat investasi EBT beberapa tahun terakhir tidak mencapai target.

Pada tahun 2020, target investasi EBT US\$2,02 miliar dan hanya terealisasi US\$1,36 miliar atau sekitar 70%. Tahun 2021 pemerintah menargetkan investasi EBT sebesar US\$ 2,04 miliar, namun target kembali tidak tercapai dan hanya terealisasi US\$1,51 miliar atau 74%. Pada tahun 2022,

pemerintah menaikkan target investasi EBT mencapai US\$3,93 miliar dan baru berhasil terealisasi US\$0,67 miliar atau 16,9% hingga Juni 2022. (Tusin, 2022)

Program Gandeng Gendong merupakan program yang cukup inovatif terbukti dengan terpilihnya Kota Yogyakarta dalam acara Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2020 dengan menempati juara dua sebagai Kota Terbaik tingkat Nasional. Selain itu, Program Gandeng Gendong juga masuk dalam 99 besar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan-RB tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa program Gandeng Gendong merupakan program yang cukup bagus dan inovatif terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menarik untuk diteliti. Hal ini bertujuan agar proses pengentasan kemiskinan dapat terwujud dengan maksimal. Setelah pemerintah kota mengeluarkan kebijakan Program Gandeng Gendong, selanjutnya menghimbau kepada seluruh kecamatan dan desa atau kelurahan untuk ikut serta dalam mensukseskan program ini.

Dalam Program Gandeng Gendong menggunakan *collaborative governance* antar *stakeholders* yang terlibat di dalamnya. Ansell dan Gash (2007) mengemukakan bahwa *Collaborative Governance* merupakan serangkaian pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan stakeholder non-state di dalam proses pembuatan

kebijakan yang bersifat formal, yang berorientasi konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset. Dalam hal ini berarti *Collaborative Governance* berarti proses kolaborasi yang mengatur sebuah kebijakan publik yang dilakukan oleh lembaga publik dengan pihak-pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak. Sesuai dengan teori di atas berarti sebuah proses kolaborasi harus melibatkan beberapa pihak baik dari pihak pemerintahan maupun non-pemerintahan dalam menjalankan kegiatannya. Sedangkan sesuai pendapat Jung (2009) menerangkan bahwa *Collaborative governance* adalah proses pembentukan, mengemudikan, memfasilitasi, mengoperasionalisasikan dan memonitor segala pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri sehingga dilaksanakan oleh beberapa pihak yang bukan lembaga publik. Dan untuk memahami bagaimana proses pelaksanaan kolaborasi maka perlu adanya pengetahuan mengenai tahapan atau model *collaborative governance*. Sesuai pendapat Ansell dan Gash (2007), mengemukakan bahwa terdapat empat tahapan dalam menjalankan proses kolaborasi yaitu: (1) Kondisi awal (Starting Condition), (2) Kepemimpinan fasilitatif, (3) Desain kelembagaan (Institutional Design), dan (4) Proses

kolaborasi, yang terdiri dari lima poin antara lain: dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), berbagi pemahaman (*share understanding*), dan kemenangan jangka menengah (*intermediet outcomes*).

Penerapan *green-economy* dalam konsep gandung-gendong di Kampung Wisata Rejowinangun Yogyakarta sudah dilakukan meski belum secara menyeluruh atau komprehensif. Berdasarkan hasil penelitian, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini:

1. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah lembaga yang didirikan warga desa yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di wilayah desa mereka. Kepariwisataan ini diharapkan bakal meningkatkan pembangunan daerah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga desa. Pokdarwis adalah kelompok yang bergerak secara swadaya artinya pengembangan kepariwisataan yang dilakukan di desa itu bersumber dari kekuatan desa sendiri dengan segala potensinya. Pokdarwis juga harus membangun dirinya secara swakarsa alias menciptakan

pengembangan berdasar potensi kreativitas yang mereka miliki karena merekalah yang memiliki kuasa atas pengembangan desa dengan segala sumber daya yang mereka miliki. Secara umum Pokdarwis Rejowinangun sudah berjalan, namun demikian belum maksimal karena terkendala sumber daya manusia yang belum fokus di pokdarwis.

2. Klaster Kerajinan berada di RW 06 dan 07 Kelurahan Rejowinangun di mana kedua RW ini banyak sekali *home industry* khususnya di bidang kerajinan baik yang sifatnya lokal maupun yang sudah dijual di luar wilayah DIY di antaranya: kerajinan kulit, fiber, ukir kayu, batik tulis dan jumputan, *shuttlecock*, lukis kaca terbalik, wayang kulit, pemanfaatan limbah plastik, dan lain sebagainya. Penerapan *green economy* di klaster kerajinan dengan banyak memanfaatkan limbah sebagai bahan baku kerajinannya. Kendala secara umum lebih di pemasaran yang sebagian besar masih dipasarkan secara konvensional, *platform-platform* yang dimiliki masih bersifat pasif. Mereka merasa '*gaptek*' alias belum mampu menggunakan teknologi secara optimal untuk membantu pemasaran produk mereka, berikut juga kebelumsiapan bagian produksi untuk menerima banyak order dari *marketplace*.
3. Klaster Agro ada di wilayah RW 11 – 13 dengan pengkhususan yang berbeda-beda misalnya RW

- 11 dengan spesialisasi anggreknya, RW 12 dengan spesialisasi edukasi khusus tanaman sayuran dan buah, RW 13 dengan spesialisasi untuk tanaman hias. Saat ini RW 13 menjadi ikon Kelurahan Rejowinangun dengan nama Kampung Wisata Agro Edukasi yang sudah mendatangkan banyak wisatawan baik dari DIY maupun luar DIY. Kampung Agro ini juga pernah tercatat dalam Museum Rekor Indonesia karena pembuatan keripik berbasis daun-daunan dengan jenis terbanyak yaitu 272 jenis daun. Saat ini keripik berbasis daun tersebut sudah dipasarkan ke berbagai daerah dan supermarket dengan brand Ron Renyah. Klaster Agro menerapkan *green economy* dengan memanfaatkan limbah makanan dari klaster kuliner dan herbal diolah menjadi desinfektan untuk bidang pertanian, menjadi pestisida alami.
4. Klaster Herbal, yang ada di kawasan RW 08 dan 09 Kelurahan Rejowinangun, memiliki spesialisasi sebagai sentra pembuat jamu gendong dan jamu instan. J'GER (Jamu Gendong Rejowinangun) adalah nama yang dipilih untuk jamu gendongnya. Kawasan RW 08 dan 09 tersebut kemudian berkembang menjadi kampung herbal sebagai upaya memenuhi kebutuhan bahan pembuatan jamu gendong dengan himbauan penanaman tanaman herbal seperti kunyit, jahe, kencur dan sebagainya dengan memanfaatkan lahan yang ada, mulai

dari halaman rumah, pinggir jalan kampung, dan juga lorong gang di sepanjang RW 08 dan 09. Konsep gandeng-gendong di klaster ini masih sebatas pemanfaatan limbah yang diolah oleh klaster agro. Kendala terbesar di klaster ini adalah kurangnya ketersediaan bahan baku, alat produksi dan sumberdaya manusia.

5. Klaster Budaya dan Klaster Kuliner dalam pemasarannya paling nampak menerapkan konsep gandeng-gendong yang dicanangkan Pemerintah Kota Yogyakarta dibandingkan klaster yang lainnya. Klaster Budaya berada di kawasan RW 01 sampai dengan 05 dengan potensi seni yang beraneka ragam, antara lain seni tari, keroncong, angklung, jathilan anak, karawitan, mocopatan, hadroh, wayang berbahasa inggris, dan lain sebagainya. Sedangkan Klaster Kuliner berada di RW 10 dengan spesifikasi sebagai sentra pembuat makanan kecil dan jajanan pasar dengan skala rumah tangga. Baik klaster budaya maupun klaster kuliner ini sudah bekerjasama '*digandeng* dan *digendong*' oleh pengusaha lokal seperti Kebun Binatang Gembiraloka dan hotel-hotel di wilayah Kelurahan Rejowinangun, diantaranya Kalya Hotel, Fave Hotel Kusumanegara, dan Grand Rohan Jogja. Klaster Kuliner juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat, dengan himbauan kepada seluruh masyarakat mulai dari tingkat RT sampai dengan lembaga sosial lainnya untuk

menggunakan produk kuliner dari RW 10 ini dalam setiap kegiatan sejak tahun 2012. Produk kuliner dari RW 10 ini diberi nama REMAJA (Rejowinangun Makmur Jaya) dan dikelola oleh P2WKSS PKK Kelurahan Rejowinangun dengan menghimpun seluruh UKM kuliner yang ada di wilayah Kelurahan Rejowinangun.

Beberapa penyebab *green-economy* di Kampung Wisata Rejowinangun tidak terlaksana dengan baik dapat diatasi dengan beberapa hal, yaitu:

1. Membangun kesadaran dan motivasi masyarakat, bahwa *green-economy urgent* untuk dilaksanakan, mengingat krisis lingkungan yang semakin tidak terelakkan. Motivasi adalah hal mendasar yang mampu menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu, maka membangun motivasi menjadi penting untuk menjadi dilakukan.
2. Perlunya membangun sistem pemasaran yang lebih profesional dan terintegrasi supaya efek ekonomi lebih banyak dirasakan oleh banyak masyarakat.
3. Pelaksanaan konsep gandeng-gendong harus lebih inovatif, dan membutuhkan sinergi yang baik dari pemerintah dan pihak-pihak terkait supaya bisa berjalan seperti yang diharapkan.

IV. PELUANG DAN KENDALA

4.1. Peluang

- 1) **Potensi yang beraneka ragam.**
Kampung Wisata Rejowinangun memiliki banyak potensi yang beraneka ragam, yang kemudian dipetakan menjadi beberapa klaster unggulan, yaitu Klaster Kampung Budaya, Klaster Kampung Kerajinan, Klaster Kampung Herbal, Klaster Kampung Kuliner, dan klaster Kampung Agro. Tujuan pengklasteran ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengenali potensi masing-masing. Kampung wisata ini menitik-beratkan pada program-program edukasi yang berkelanjutan dengan inovasi-inovasi yang berusaha dikembangkan supaya tetap memiliki daya tarik untuk dikunjungi baik wisatawan dari dalam maupun luar DIY.
- 2) **Lokasi**
Kampung Wisata Rejowinangun yang berada di tengah Kota Yogyakarta, menjadi daya tarik tersendiri. Tidak perlu jauh-jauh, anak-anak TK/SD atau wisatawan bisa belajar bercocok tanam di sini. Meski memiliki lahan terbatas tetap mampu mengoptimalkan potensi, bahkan dibidang pertanian dengan mempertahankan sawah yang ada, juga pemanfaatan lahan dengan sistem lorong sayur dan sintamina.

3) Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat berupa tenaga, fikiran dan dana menjadi dasar utama untuk mengembangkan dan mengelola Kampung Wisata Rejowinangun. Beberapa tokoh masyarakat menginisiasi ingin meningkatkan kesejahteraan dengan menggali dan mengelola potensi wilayah melalui kampung wisata di tahun 2010, dengan merintis kawasan agro. Diawali dengan himbauan setiap rumah itu menanam minimal 5 tanaman sayur atau buah, dan kemudian berkembang dengan klaster lain di RW lainnya.

4.2. Kendala

1) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sekitar Kampung Wisata Rejowinangun masih belum tergerak untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan di kampung wisata karena mereka tidak merasakan efek ekonomi secara langsung dan berkesinambungan. Misalnya ketika masyarakat memproduksi tas dari limbah sabun cair, atau hiasan bunga dari limbah plastik, kemudian tidak ada yang membeli atau bingung dipasarkan ke mana. Demikian pula dengan partisipasi pengelola kampung wisata yang masih sangat terbatas, karena belum ada sistem *sharing profit* yang jelas, sehingga banyak yang enggan.

Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh (Ali et al., 2021) yang menyatakan bahwa hal yang

paling kritis adalah menumbuhkan kesadaran, partisipasi, serta pemahaman tentang perlindungan lingkungan, pengembangan teknologi hijau, penanggulangan kemiskinan dan usaha untuk mengurangi tingkat buta huruf di negara.

2) Keterbatasan Bahan Baku

Di beberapa klaster seperti herbal dan kerajinan masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumberdaya dari dalam Kampung Wisata Rejowinangun. Dari klaster herbal misalnya, untuk bahan baku membuat minuman herbal, selain kuantitas, kualitas rempah-rempah yang dihasilkan belum sebagus dari Wonogiri, dikarenakan faktor alam seperti tanah dan suhu udara. Sedangkan di klaster kerajinan blangkon, mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumberdaya manusia dari lingkungan yang mau belajar membuat blangkon.

3) Keterbatasan Sumberdaya Manusia

Salah satu penggiat kerajinan blangkon di klaster kerajinan mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumberdaya manusia dari lingkungan sekitar yang mau belajar membuat blangkon, sehingga mereka harus ke Gunungkidul untuk membantu produksinya.

Demikian juga, sumber daya manusia dalam mengelola kampung wisata, dikarenakan banyak warga yang sudah memiliki kesibukan sendiri-

sendiri di luar seperti menjadi dosen, guru, petani, kuli bangunan, pedagang, dan lain sebagainya, sehingga sering tidak punya waktu untuk mengurus kampung wisata.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) tentang kampung wisata Kungkuk yang memang memiliki sumber daya alam yang mendukung, di kampung wisata Rejowinangun karena memang berada di dalam Kota Yogyakarta tidak memiliki lahan yang cukup luas dan potensial untuk menyediakan bahan baku.

4) Strategi Pemasaran

Meski sudah mampu mendatangkan wisatawan baik dari dalam maupun luar DIY, namun secara umum efek ekonomi di Kampung Wisata Rejowinangun belum dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini disebabkan salah satunya sistem/strategi pemasaran yang belum dikelola dengan sistematis dan terintegrasi. Saat ini Kampung Wisata Rejowinangun sedang berbenah dengan digitalisasi produk-produk UMKM, terutama kerajinan karena terkait ketersediaan. Sedangkan produk-produk kuliner masih terkendala label halal dan *expired-date* nya. Diharapkan dengan strategi pemasaran yang lebih sistematis dan terintegrasi, dapat meningkatkan efek ekonomi bagi semua masyarakat di Rejowinangun.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Siagian (2022) yang menyatakan bahwa salah

satu faktor yang menyebabkan penerapan *green economy* belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena masih terdapat beberapa prinsip yang belum diterapkan dengan baik. Masyarakat juga masih kurang inovatif dalam melihat peluang yang ada.

5) Peran Pemerintah

Bantuan pemerintah berupa pendampingan atau fasilitasi untuk mengembangkan UMKM dalam kluster yang ada di Kampung Wisata Rejowinangun belum terlihat dampaknya secara optimal. Bantuan pemerintah berwujud fisik yang sudah pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu tetapi tidak ada tindakan lanjutan dari pemerintah terhadap UMKM yang memperolehnya. Dari UMKM lain di kluster pengrajin juga disampaikan bahwa peran pemerintah tidak begitu dirasakan karena UMKM tersebut memang sudah sejak awal berdiri adalah milik perorangan dan tidak ada kaitan dengan berdirinya kampung wisata.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh (Ali et al., 2021) bahwa komitmen yang kuat harus dibuat khusus oleh pemerintah dan para pembuat kebijakan lain untuk mendukung industri hijau pembangunan dengan lebih memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, upaya yang lebih harus dibuat oleh pemerintah dan pengambil kebijakan mendukung transformasi dan penerapan *green economy*.



Gambar : Green economy dan hubungan dengan berbagai macam faktor
Sumber: Muhammad (2018)

Menurut (Mahboob Ali, 2018) gambar di atas merupakan *green economy* dan hubungannya dengan berbagai faktor, yaitu produk hijau, kesadaran konsumen, keberlanjutan, status hukum terkait dengan produk hijau, kerjasama umum-swasta-asing, inovasi dan pemanfaatan teknologi, ramah lingkungan, harga yang semakin adil dan merata, keuntungan, pembiayaan hijau, keseimbangan ekologi, dan investasi hijau.

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat di Kampung Wisata Rejowinangun memiliki tingkat pemahaman terkait *green economy* masih rendah, maka penerapannya juga masih terbatas pada kegiatan pemanfaatan limbah,

keseimbangan ekologi dan kerjasama dengan perusahaan lokal saja. Konsep gandeng-gendong berdasarkan beberapa informasi yang dipahami peneliti, sejalan dengan *public-private-foreign collaboration* seperti yang dinyatakan oleh (Mahboob Ali, 2018) pada gambar di atas. Konsep gandeng gendong sebagai perencanaan strategis untuk pembangunan yang mengintegrasikan seluruh pelaku 5K, yaitu: kampung, kota, komunitas, kampus, dan korporat (Iza dan Nurhaeni, 2021). Sosialisasi tentang *green economy* pada masyarakat di Kampung Wisata Rejowinangun diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kegiatan-kegiatan yang mendukung penerapan *green economy*.

V. SIMPULAN

Penerapan *Green-economy* dalam Konsep Gandeng Gendong di Kampung Wisata Rejowinangun dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain, penggunaan limbah sebagai bahan baku membuat kerajinan, pengolahan sampah organik menjadi kompos dan media tanam, pemanfaatan lahan terbatas menjadi lorong sayur dan kawasan terbuka hijau, adanya sumber-sumber penghasilan serta lapangan pekerjaan yang baru. Namun demikian, penerapan *Green-economy* di Kampung Wisata Rejowinangun belum dilaksanakan secara menyeluruh dikarenakan ada beberapa faktor, antara lain kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih rendah, serta strategi pemasaran yang belum tersistematis dan terintegrasi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pengumpulan data primer dengan wawancara belum sepenuhnya mencerminkan kondisi senyatanya di Kampung Wisata Rejowinangun karena hanya dilakukan pada perwakilan penggiat klaster tertentu di mana para penggiat masing-masing klaster itu sebenarnya sangat beragam jenisnya. Kedua, keterbatasan waktu penelitian juga menjadi faktor penelitian ini belum bisa dilakukan secara lebih luas. Ketiga, pemahaman masyarakat di Kampung Wisata Rejowinangun terhadap istilah *green economy* itu sendiri masih kurang. Kegiatan terkait dengan kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat cukup dipahami, namun istilah *green economy* belum, sehingga peneliti harus menjelaskan terlebih dulu tentang *green economy*.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik untuk kalangan akademik, pelaku pariwisata, dan juga pemerintah. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan pendampingan terhadap kampung wisata yang ada di Kota Yogyakarta untuk menerapkan *green economy* dalam konsep gandeng gendong. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kampung-kampung wisata tersebut.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andrew Jarvis, A. V. 2011. Assessing Green Jobs Potential in Developing Countries: a Practitioner's Guide. Genewa: International Labour Organization.

Ansell, C. dan Alison G. 2007. Collaborative Governance In Theory And Practice. JPART. University of California: Berkeley

Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

<https://jogja.tribunnews.com/2021/12/27/maret-2022-tpst-piyungan-ditutup-wargasekitar-piyungan-diimbau-tak-mengembalikan-sapi>. (diakses tanggal 10 Februari 2022 jam 15.14)

<https://alamisharia.co.id/blogs/green-economy-di-indonesia/> (diakses tanggal 19 November 2022 jam 14.53)

<https://kumparan.com/tugujogja/gandeng-gendong-upaya-pemerintah-jogjaberdayakan-masyarakat-1vblyMyFS9Z/full> (diakses tanggal 12 Februari 2022 jam 13.34)

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/gandeng-gendong-mengentaskan-kemiskinan-kota-yogyakarta> (diakses 19 Desember 2022 jam 09.50)

Astiana, R., Kartika, T., dan Tawakal, M.I. 2022. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Wisata di Kampung Wisata Cibiru. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat* Volume 3, Nomor 1, September 2022, hal 50-58.

Iza, S. M. dan Nurhaeni, I. D. A. 2021. Proses Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan: Studi Kasus pada Program Gandeng Gendong di Yogyakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* Volume 1, Nomor 2, 2021 hal. 365-379.

Ali, E. B., Anufriev, V. P., & Amfo, B. (2021). Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: A review. *Scientific African*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00756>

Law, A., De Lacy, T., Lipman, G., & Jiang, M. (2016). Transitioning to a green economy: The case of tourism in Bali, Indonesia. *Journal of Cleaner Production*, 111. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.12.070>

Mahboob Ali, M. (2018). Existing situation and prospects of green economy: evidence from Bangladesh. *Environmental Economics*, 9(2). [https://doi.org/10.21511/ee.09\(2\).2018.01](https://doi.org/10.21511/ee.09(2).2018.01)

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods). In *Alfabet*.

Firmansyah, M. 2022. Konsep Turunan Green economy dan Penerapannya: Sebuah Analisis Literatur. *Ecoplan* Vol. 5 No. 2, October 2022, hal 141- 149.

Jung, Yong-duck; Mazmanian, Daniel; Tang, Shui-Yan. 2009. Collaborative Governance In The United States and Korea: Cases In Negotiated Policy Making and Service Delivery. Article. School of Policy, Planning and Development, University Of South California, Bedrosian Center On Governance and Public Enterprise, Los Angeles.

Kasztelan, A. (2017). Green growth, Green economy and sustainable development: Terminological and relational discourse. *Prague Economic Papers*, 26(4), 487–499. <https://doi.org/10.18267/j.pep.626>

Nugroho, Riant. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Putra, E., Elsyra, N., dan Zaenuri, M. 2020. Tata Kelola Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Yogyakarta: Program Gandeng Gendong. *Jurnal Tata Sejuta* Vol. 6 No 2, hal 571-592.

Rahmayani, Dwi. 2022. Peningkatan Kapabilitas Green Economy dalam Pengembangan Desa Wisata sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kumawula*, Vol. 5, No.1, April 2022, Hal 171 – 178

Sari, A.M., Wijaya, A. F., dan Wachid, A. 2014. Penerapan Konsep Green Economy dalam Pengembangan Desa Wisata sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No.4, hal 765-770.

Titisari, E. Y., Azizah, S., Kurniawan, S., Ridjal A. M., dan Yuniarti, R. 2022. Aplikasi Konsep Eco-Culture dalam

Pengembangan Kampung Wisata Buah Baran Bercahaya.
RUAS (Review of Urbanism and Architectural Studies) Vol.
20 No. 1, hal.109-117.

Tusin, Umar. 2022. Penerapan Green Economy di
Indonesia: Tantangan dan Perkembangan.
[https://landx.id/blog/penerapan-green-economy-di-
indonesia-tantangan-dan-perkembangan/](https://landx.id/blog/penerapan-green-economy-di-indonesia-tantangan-dan-perkembangan/) (diakses
tanggal 12 Desember 2022 jam 12.02)

Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis
Kurikulum. Jakarta. Grasindo



STIE Widya Wiwaha

ISBN 978-623-99100-3-7 (PDF)



9 786239 910037